

## **BAB II**

### **Tinjauan Pustaka**

#### **2.I. Kajian Pustaka**

Dalam setiap melakukan penelitian, kajian pustaka mempunyai fungsi membantu penentuan tujuan dan alat penelitian dengan memilih konsep-konsep yang tepat. Kajian pustaka digunakan sebagai kerangka dasar dalam melakukan analisis terhadap objek yang diteliti. Sehingga pada dasarnya, kajian pustaka mempunyai fungsi untuk menjelaskan gejala dan permasalahan yang akan diteliti. Bagian ini memuat uraian secara sistematis tentang hasil penelitian terdahulu tentang persoalan yang akan dikaji dalam penelitian. Hasil-hasil penelitian terdahulu antara lain :

Susilo Utomo (2015), dengan judul penelitian tentang kegagalan calon perempuan dalam Pemilu Kabupaten Merangin Tahun 2013. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor finansial juga merupakan penyebab kekalahan pasangan Syukur-Fauziah dalam Pemilu Kabupaten Merangin lalu. Tentu faktor finansial menjadi hal yang sangat penting, karena untuk maju di dalam pertarungan Pemilu Kabupaten membutuhkan finansial yang tidak sedikit. Sedangkan Mimin Anwartinna (2014) meneliti tentang kemenangan Anton-Sutiaji dalam Pemilihan Walikota (pilwali) Kota Malang tahun 2013. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa selain modal ekonomi tentu dibutuhkan modal lainnya seperti modal sosial, modal politik, modal budaya dan juga modal simbolik.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Akbar Candra (2014) dengan judul kekuatan politik lokal dalam kemenangan Syahrul Yasin Limpo (SYL) pada Pemilihan Gubernur Tahun 2013 daerah pemilihan Kabupaten Gowa. Hasil

penelitian ini ditemukan faktor paling dominan yaitu yaitu modalitas politik seperti posisi Syahrul Yasin Limpo sebagai gubernur dan juga sebagai Ketua DPD I Partai Golkar Sulsel. Begitu juga penelitian yang dilakukan oleh Taufiq Rohman et.al (2013) dengan judul strategi pemenangan petahana dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Ngawi 2010. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa modal politik sangat berpengaruh seperti Strategi koalisi 4 partai pengusung, kedudukan keempat partai tersebut sangat kuat dengan mengisi 24 kursi di parlemen.

Hasil lainnya yang sejenis dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Akbar Candra (2014) dan Taufiq Rohman et.al (2013) yang berkaitan tentang modal politik, yaitu Melky Jakhin Pangemanan (2013) dan Yovaldri Riki Putra (2010). Dari hasil penelitian keduanya dapat disimpulkan bahwa, partai pengusung yang bekerja begitu optimal dapat menjadi faktor penentu dan juga untuk mengoptimalkan modal politik lainnya tentu dipengaruhi oleh modal manusia dan modal moral yang dimiliki.

Penelitian yang dilakukan oleh Fitriyah, Hermi Susiatianingsih dan Supratiwi (2014) tentang kemenangan pasangan Yoyok Riyo Sudibyo dan H. Soetadi SH. MM sebagai Bupati dan Wakil Bupati Batang adalah merupakan hasil dari daya tarik figur. Hasil penelitian serupa oleh I Gede Parguna Wisesa (2014) tentang peranan modal sosial dalam kemenangan Satono dari jalur independen, hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa modal sosial yang dimiliki seperti *trust* (kepercayaan masyarakat) yang berasal dari ketokohan Satono dan juga kelihaihan strategi memasarkan diri untuk mendapat *social networking* (dukungan masyarakat).

Hasil penelitian terkait faktor figuritas atau ketokohan yang dilakukan oleh Joni Firmansyah (2013) dengan judul analisis kemenangan Ahmad Heryawan dalam Pemilu Kepala Daerah Jawa Barat Tahun 2013. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa ada lima faktor yang mempengaruhi kemenangan Ahmad Heryawan. Tetapi faktor yang paling dominan ialah faktor figuritas Ahmad Heryawan itu sendiri. Ahmad Heryawan dinilai pemimpin yang mampu memiliki karakteristik sesuai dengan kebudayaan masyarakat Jawa Barat yang Islami.

**Tabel 2.1. Tinjauan Pustaka**

Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
Susilo utomo (2015)	Kegagalan Calon Perempuan dalam Pemilukada Kabupaten Merangin Tahun 2013 (Studi Kasus Fauziah, SE)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor finansial juga merupakan penyebab kekalahan pasangan Syukur-Fauziah dalam Pemilukada Merangin lalu. Tentu faktor finansial menjadi hal yang sangat penting, karena untuk maju di dalam pertarungan Pemilukada membutuhkan finansial yang tidak sedikit, dengan demikian ketokohan seorang figur kandidat akan sangat menentukan tingkat keterpilihannya. Akan tetapi, popularitas saja belum cukup untuk dapat memenangi pertarungan Pemilukada. Faktor modal finansial juga sangat menentukan dalam Pemilukada.
Mimin Anwartinna (2014)	Kemenangan Anton-Sutiaji (Aji) Dalam Pemilihan Walikota (Pilwali) Kota Malang Tahun 2013	Hasil penelitian ini menyimpulkan, Anton-Sutiaji memiliki lima modalitas, yaitu; a. Modal sosial berasal dari dukungan masyarakat; b. Modal politik merupakan dukungan dari PKB dan Partai Gerindra yang saling bekerjasama untuk memenangkan Anton-Sutiaji; c. Modal ekonomi selain berasal dari sumbangan para pengusaha, juga berasal dari dana pribadi. d. Modal budaya dimiliki Anton-Sutiaji dari basis massa NU yang jumlahnya cukup banyak, sehingga optimalisasi suara dilakukan dalam

		internal NU untuk membantu pemenangan Anton-Sutiaji; e. Modal simbolik lebih menekankan pada figur <i>Abah</i> Anton yang memang sudah dikenal sebagai seorang yang dermawan di mata masyarakat, sehingga Anton-Sutiaji sudah memiliki citra positif di masyarakat.
Akbar Candra (2014)	Kekuatan Politik Lokal Dalam Pemenangan Syahrul Yasin Limpo (Syl) Pada Pemilihan Gubernur 2013 Daerah Pemilihan Kabupaten Gowa	Hasil penelitian ini yaitu sebagai berikut; a. Posisi sebagai Gubernur/Petahana b. Ketua DPD I Golkar Sulsel c. Cerdas, berpengalaman dan dianggap Representasi etnis lokal Makassar d. Ketokohan atau kharisma pribadi. Dari keempat faktor tersebut, yang paling dominan adalah posisi Syahrul Yasin Limpo sebagai gubernur. Syahrul Yasin Limpo bukan hanya menjabat sebagai gubernur, tetapi juga Ketua DPD I Partai Golkar Sulsel.
Fitriyah, Hermini Susiatianingsih dan Supratiwi (2014)	Faktor Determinan Kemenangan Kandidat Pada Pemilukada Kabupaten Batang 2011	Hasil penelitian ini adalah, Kemenangan pasangan Yoyok Riyo Sudibyo dan H. Soetadi SH. MM sebagai Bupati dan Wakil Bupati Batang hasil dari daya tarik figur. Pasangan calon ini yang paling mendekati karakteristik bupati dan wakil bupati yang diinginkan pemilih, yakni, memiliki aspek sosiologis yang diharapkan pemilih, seperti putra daerah, beragama Islam, usia matang, di tambah latar belakang profesinya adalah pensiunan TNI AD, mewakili karakteristik pemimpin yang jujur dan bersih. Mereka mempunyai rekam jejak baik, khusus Soetadi dikenal sebagai birokrat yang jujur dan bersih dan dinilai paling banyak melakukan kunjungan/pertemuan langsung dengan warga masyarakat dan dianggap paling mampu mengatasi berbagai persoalan pembangunan di Kabupaten Batang.
I Gede Parguna Wisesa (2014)	Peranan Modal Sosial Dalam Kemenangan Satono Dari Jalur Independen Pada Pemilihan	Hasil Penelitian ini dalam kasus Pemilu Kepala Daerah Kabupaten Lampung Timur yang diadakan pada tahun 2010 lalu yaitu, mengukuhkan Satono-Erwin sebagai pemimpin daerah Kabupaten Lampung Timur untuk yang kedua kalinya. Pasangan ini kerja keras membangun kepercayaan

	Umum Kepala Daerah Di Kabupaten Lampung Timur Tahun 2010	masyarakat ( <i>trust</i> ), kerja keras membangun kedekatan dengan masyarakat ( <i>norm</i> ), dan kelihaihan strategi memasarkan diri untuk mendapat dukungan masyarakat ( <i>social networking</i> ), Kemampuan Satono dalam memanfaatkan situasi serta memaksimalkan potensi yang beliau miliki melalui jabatan kepala daerah sebelumnya ( <i>incumbent</i> ).
Taufiq Rohman et.al (2013)	Strategi Pemenangan Petahana Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Ngawi 2010	Hasil penelitian ini adalah, (1) Strategi koalisi 4 partai pengusung, kedudukan keempat partai tersebut sangat kuat dengan mengisi 24 kursi diparlemen. (2) Tim Pemenangan yang Solid, tim pemenangan diisi kalangan lintas sektoral, oleh orang-orang yang sangat berpengaruh diwilayahnya. (3) Strategi jaringan politik, pasangan Kanang-Ony mampu menggandeng organisasi-organisasi berpengaruh yang berbasis massa.
Melky Jakhin Pangemanan (2013)	Pemasaran Politik Pada Pemilukada (Suatu Studi Pemasaran Politik Pasangan Hanny Sondakh & Maximilian Jonas Lomban, Se, M.Si Pada Pemilukada Di Kota Bitung Tahun 2010	Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, figur pasangan ini dikenal sangat dekat dengan masyarakat dengan banyak melakukan kunjungan-kunjungan. Pull marketing dari pasangan calon Hanny Sondakh dan Maximilian Jonas Lomban, S.E., M.Si, terlihat dari strategi penggunaan media dalam memasarkan kinerja dan prestasi dari keduanya yang dibungkus melalui media masa, selain itu juga, mesin partai pengusung yang bekerja begitu optimal. Tim sukses pasangan ini juga menarik organisasi-organisasi keagamaan, adat, budaya dan figur-figur yang dianggap berpengaruh dalam organisasi-organisasi tersebut.
Joni Firmansyah (2013)	Analisis Kemenangan Ahmad Heryawan Dalam Pemilu Kepala Daerah Jawa Barat Tahun 2013	Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa ada lima faktor yang mempengaruhi kemenangan Ahmad Heryawan. Adapun kelima faktor tersebut adalah: a. Figuritas Ahmad Heryawan b. Deddy Mizwar sebagai <i>Mass Getter</i> c. Prestasi Ahmad Heryawan dan Posisi <i>Incumbent</i> d. Kekuatan Mesin Partai Politik e. Kekuatan Tim Pemenangan Ahmad Heryawan-

		Deddi Mizwar. Dari kelima faktor kemenangan Ahmad Heryawan diatas, faktor yang paling dominan ialah faktor figuritas Ahmad Heryawan itu sendiri. Ahmad Heryawan dinilai pemimpin yang mampu memiliki karakteristik sesuai dengan kebudayaan masyarakat Jawa Barat yang Islami. Sosok dirinya yang <i>fleksibel</i> dapat menciptakan harmoni koalisi partai politik dalam kemenangan dirinya pada pemilukada tersebut.
Yovaldri Riki Putra (2010)	Optimalisasi Modal Politik Pasangan Ismet Amzis-Harma Zaldi Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2010	Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Optimalisasi modal politik pasangan Ismet amzis-Harma zaldi didasarkan pada modal manusia dan modal moral yang dimiliki oleh Ismet Amzis. Kedua modal ini memberikan dampak langsung kepada modal sosial pasangan ini, namun secara khusus modal manusia memberikan optimalisasi terlebih dahulu terhadap modal simbolik dan modal budaya dari pasangan Ismet Amzis-Harma Zaldi pada pemilukada kota Bukittinggi tahun 2010. Modal sosial yang seperti ini memberikan efek pula kepada modal lembaga dan modal ekonomi pasangan Ismet Amzis-Harma Zaldi pada pemilukada Kota Bukittinggi tahun 2010.

Bila melihat kajian sebelumnya di atas, maka posisi penelitian ini merupakan penelitian yang secara spesifik memfokuskan analisis pada empat modalitas sekaligus yaitu modal sosial, modal budaya, modal politik dan modal ekonomi. Dimana penelitian ini ingin menjelaskan bahwa ketokohan dan popularitas tidak menjadi tolak ukur dalam mengarungi kontestasi politik, maka dari itu peneliti tidak hanya ingin menjelaskan dari satu sisi saja terkait modalitas dalam kontestasi politik, tetapi penulis ingin mengkombinasikan empat modal sekaligus untuk menjawab dinamika yang ada.

Beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan terutama kaitannya dengan tema modalitas dalam kontestasi politik lokal, maka posisi penelitian ini adalah mengkaji secara komperhensif tentang analisis modalitas calon bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2015 yaitu Indah Putri Indriani.

## **2.2 Kerangka Teoritik**

### **2.2.1. Kontestasi dalam Politik**

Menurut Gustaf Kusno (2013), secara sepintas istilah “kontestasi” itu nampak sah sebagai pengindonesiaan dari kata Inggris *contestation*. Namun demikian, hal tersebut sudah menyerap kata *contestant* menjadi “kontestan” yang menurut KBBI bermakna peserta kontes (perlombaan, pemilihan dsb). Pengertian kontestasi menurut Oxford Dictionaries. Misalnya dalam kamus tersebut dikatakan bahwa kontestasi adalah tindakan atau proses yang berselisih atau berdebat, misalnya kontestasi ideologis atas kebijakan sosial dan bahkan juga di dalam pemilihan umum.

Pemilu merupakan salah satu sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang berdasarkan pada demokrasi perwakilan. Pemilu dapat diartikan sebagai mekanisme penyeleksian dan pendelegasian atau penyerahan kedaulatan kepada orang atau partai yang dipercayai (Surbakti, 1992: 181). Orang atau partai yang dipercayai, kemudian menguasai pemerintahan sehingga melalui pemilu diharapkan dapat diciptakan pemerintahan yang representatif (*representatif government*) (Cholisin, dkk, 2006: 126).

Para pemilih dalam Pemilu juga disebut konstituen, dan kepada merekalah para peserta Pemilu menawarkan janji-janji dan program-programnya pada masa kampanye. Kampanye dilakukan selama waktu yang telah ditentukan, menjelang

hari pemungutan suara. Setelah pemungutan suara dilakukan, proses penghitungan dimulai. Pemilu ditentukan oleh aturan main atau sistem penentuan pemenang yang sebelumnya telah ditetapkan dan disetujui oleh para peserta, dan disosialisasikan kepada pemilih.

### **1. Pengertian Pemilihan Umum (PEMILU)**

Pengertian Pemilu menurut UU No. 3 Tahun 1999 tentang Pemilu. Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam negara kesatuan RI yang berdasarkan Pancasila dan UUD. Pemilu adalah suatu proses di mana para pemilih memilih orang-orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Jabatan-jabatan yang disini beraneka-ragam, mulai dari Presiden, wakil rakyat di berbagai tingkat pemerintahan, sampai kepala desa.

- a. Menurut (Ramlan, 1992:181) Pemilu diartikan sebagai “ mekanisme penyeleksian dan pendelegasian atau penyerahan kedaulatan kepada orang atau partai yang dipercayai.
- b. Menurut Ali Moertopo pengertian Pemilu sebagai berikut: “Pada hakekatnya, pemilu adalah sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya sesuai dengan azas yang bermaktub dalam Pembukaan UUD 1945. Pemilu itu sendiri pada dasarnya adalah suatu Lembaga Demokrasi yang memilih anggota-anggota perwakilan rakyat dalam MPR, DPR, DPRD, yang pada gilirannya bertugas untuk bersama-sama dengan pemerintah, menetapkan politik dan jalannya pemerintahan negara”.
- c. Menurut Suryo Untoro “Bahwa Pemilihan Umum (yang selanjutnya disingkat Pemilu) adalah suatu pemilihan yang dilakukan oleh warga negara

Indonesia yang mempunyai hak pilih, untuk memilih wakil-wakilnya yang duduk dalam Badan Perwakilan Rakyat, yakni Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I dan Tingkat II (DPRD I dan DPRD II)”.

Dari beberapa definisi diatas maka dapat disimpulkan mengenai pengertian pemilihan umum secara luas yaitu sebagai sarana yang penting dalam kehidupan suatu negara yang menganut azas demokrasi yang memberi kesempatan berpartisipasi politik bagi warga negara untuk memilih wakil-wakilnya yang akan menyuarkan dan menyalurkan aspirasi mereka.

## **2. Tujuan pemilu**

Pemilu diselenggarakan dengan tujuan untuk memilih wakil rakyat dan wakil daerah, serta untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945.

Menurut Prihatmoko (2003:19) pemilu dalam pelaksanaannya memiliki tiga tujuan yakni:

- a. sebagai mekanisme untuk menyeleksi para pemimpin pemerintahan dan alternatif kebijakan umum (*public policy*).
- b. pemilu sebagai pemindahan konflik kepentingan dari masyarakat kepada badan badan perwakilan rakyat melalui wakil wakil yang terpilih atau partai yang memenangkan kursi sehingga integrasi masyarakat tetap terjamin.

- c. pemilu sebagai sarana memobilisasi, menggerakkan atau menggalang dukungan rakyat terhadap Negara dan pemerintahan dengan jalan ikut serta dalam proses politik.

Menurut Huntington (2001:18) pemilu dalam pelaksanaannya memiliki lima tujuan yakni:

- a. Pemilu sebagai implementasi perwujudan kedaulatan rakyat. Asumsi demokrasi adalah kedaulatan terletak di tangan rakyat. Karena rakyat yang berdaulat itu tidak bisa memerintah secara langsung maka melalui pemilu rakyat dapat menentukan wakil-wakilnya dan para wakil rakyat tersebut akan menentukan siapa yang akan memegang tampuk pemerintahan.
- b. Pemilu sebagai sarana untuk membentuk perwakilan politik. Melalui pemilu, rakyat dapat memilih wakil-wakilnya yang dipercaya dapat mengartikulasikan aspirasi dan kepentingannya. Semakin tinggi kualitas pemilu, semakin baik pula kualitas para wakil rakyat yang bisa terpilih dalam lembaga perwakilan rakyat.
- c. Pemilu sebagai sarana untuk melakukan penggantian pemimpin secara konstitusional. Pemilu bisa mengukuhkan pemerintahan yang sedang berjalan atau untuk mewujudkan reformasi pemerintahan. Melalui pemilu, pemerintahan yang aspiratif akan dipercaya rakyat untuk memimpin kembali dan sebaliknya jika rakyat tidak percaya maka pemerintahan itu akan berakhir dan diganti dengan pemerintahan baru yang didukung oleh rakyat.

- d. Pemilu sebagai sarana bagi pemimpin politik untuk memperoleh legitimasi. Pemberian suara para pemilih dalam pemilu pada dasarnya merupakan pemberian mandat rakyat kepada pemimpin yang dipilih untuk menjalankan roda pemerintahan. Pemimpin politik yang terpilih berarti mendapatkan legitimasi (keabsahan) politik dari rakyat.
- e. Pemilu sebagai sarana partisipasi politik masyarakat untuk turut serta menetapkan kebijakan publik. Melalui pemilu rakyat secara langsung dapat menetapkan kebijakan publik melalui dukungannya kepada kontestan yang memiliki program-program yang dinilai aspiratif dengan kepentingan rakyat. Kontestan yang menang karena didukung rakyat harus merealisasikan janji-janjinya itu ketika telah memegang tampuk pemerintahan.

Dari berbagai pendapat para ahli mengenai tujuan pemilu diatas dapat diketahui bahwa tujuan dari pemilu adalah untuk menyeleksi para pemimpin pemerintahan baik di eksekutif (pemerintah) maupun legislatif, serta untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagai mana diamanatkan dalam UUD 1945.

### **3. Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**

Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilu untuk memilih pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang diusulkan oleh parpol (Partai Politik) atau gabungan parpol dan perseorangan. Sejak tahun 2005, telah diselenggarakan Pilkada secara langsung, baik di tingkat provinsi

maupun kabupaten/kota. Penyelenggaraan ini diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa “Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil”.

Pilkada masuk dalam rezim Pemilu setelah disahkannya UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum sehingga sampai saat ini Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah lebih dikenal dengan istilah Pemilukada. Pada tahun 2008, tepatnya setelah diberlakukannya UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

### **2.2.2. Modalitas dalam Kontestasi Politik**

Pemilukada merupakan proses demokrasi secara *procedural* dan *substansial* dengan cara memilih orang/figur dan kemenangan ditentukan oleh perolehan suara terbanyak. Dalam demokrasi semua warga negara memiliki kesempatan yang sama dalam mencalonkan sebagai kepala daerah dengan diberi kebebasan yang cukup besar untuk membentuk organisasi-organisasi politik, menyalurkan aspirasi politiknya, dan ikut kompetisi didalam penempatan jabatan-jabatan publik yang dipilih, tetapi di dalam tataran empiris, kesempatan itu sebenarnya berbeda antara satu dengan orang lain karena modal yang dimiliki setiap orang dalam kontestasi pemilukada secara langsung pada kenyataannya berbeda-beda.

Pierre Bourdieu (1986), dalam bukunya *The Forms of Capital* membedakan tiga bentuk modal yakni modal ekonomi, modal budaya, dan modal sosial. Menurut Bourdieu (1986), definisi modal sangat luas dan mencakup hal-hal material (yang

dapat memiliki nilai simbolik), serta modal budaya (yang didefinisikan sebagai selera bernilai budaya dan pola-pola konsumsi). modal budaya dapat mencakup rentangan luas properti, seperti seni, pendidikan, dan bentuk-bentuk bahasa.

Bagi Bourdieu, modal berperan sebagai relasi sosial yang terdapat di dalam suatu sistem pertukaran, dan istilah ini diperluas pada segala bentuk barang baik materil maupun simbol, tanpa perbedaan yang mempresentasikan dirinya sebagai sesuatu yang jarang dan layak untuk dicari dalam sebuah formasi sosial tertentu. Modal harus ada dalam sebuah ranah, agar ranah tersebut dapat memiliki arti. Namun, hal itu juga dapat dijelaskan pada tingkat yang lain dengan menggunakan rumusan generatif. Penjelasan seperti ini sedikit bersifat artifisial namun bermanfaat. Keterkaitan antara ranah, habitus, modal bersifat langsung. Nilai yang diberikan modal dihubungkan dengan berbagai karakteristik sosial dan kultural habitus.

Jenis-jenis modal yang dikenali dalam ranah-ranah tertentu dan yang digabungkan kedalam habitus, sebagian juga dihasilkan oleh basis material tersebut. Modal juga dipandang Bourdieu sebagai basis dominasi. Beragam jenis modal dapat ditukar dengan jenis-jenis modal lainnya. Yang artinya modal bersifat dapat ditukar. Penukaran paling hebat yang telah dibuat adalah penukaran pada modal simbolik, sebab dalam bentuk inilah modal yang berbeda dipersepsi dan dikenali sebagai sesuatu yang *legitimate*.

Agar dipandang sebagai seseorang atau kelas yang berstatus dan mempunyai prestise, berarti ia harus diterima sebagai sesuatu yang *legitimate*. Posisi semacam itu membawa kekuasaan untuk memberi nama (aktivitas, kelompok) kekuasaan mewakili pendapat umum dan utamanya, kekuasaan

menciptakan versi dunia sosial yang resmi. Pada abad ke-16 dan 17 istilah “*capital*” digunakan untuk menunjuk kepada, atau (a) stok uang yang akan dipakai untuk membeli komoditi fisik yang kemudian dijual guna memperoleh keuntungan, atau (b) stok komoditi itu sendiri. Pada waktu itu istilah “*stock*” dan istilah “*capital*” sering dipakai secara sinonim. Perusahaan dagang Inggris yang didirikan dalam masa itu atas dasar saham misalnya, dikenal sebagai *join stock companies* atau *capital stock companies*.

Adam Smith dalam *the wealth of nation* (1776) dikutip Augusto Bunga (2008), Pembedaan ini didasarkan atas kriteria sejauh mana suatu unsur modal itu dalam jangka waktu tertentu hanya terkonsumsi sebagian hanya sebagian kecil nilainya menjadi susut, maka unsur itu disebut “*fixed capital*” (misal mesin, bangunan, dan sebagainya). Tetapi jika unsur modal terkonsumsi secara total, maka ia disebut “*circulating capital*” (misal tenaga kerja, bahan mentah dan sarana produksi). Di dalam proses pikada sebagai arena kontestasi politik dengan memilih orang dan kompetisi antar kandidat, maka kandidat yang kemungkinan memenangkan pemilukada manakala memiliki modalitas terbangun.

Modal utama yang harus dimiliki para kandidat yang hendak mengikuti kontestasi di dalam pemilukada langsung, yaitu modal sosial, modal budaya, modal politik dan modal ekonomi. Pasangan calon kepala daerah itu memiliki peluang besar terpilih manakala memiliki akumulasi lebih dari satu modal, semakin besar pasangan calon yang mampu mengakumulasi empat modal itu, maka semakin berpeluang terpilih sebagai kepala daerah. Peluang terpilihnya pasangan kandidat merupakan bagian dari proses yang kompleks, maka tidak bisa dikatakan sebagai hasil hanya dari salah satu faktor saja atau modalitas tertentu.

Dalam penelitian ini memfokuskan pada teori modal sosial, modal budaya, modal politik, dan modal ekonomi, sehingga memiliki porsi uraian teoritik yang lebih kuat dan mendalam. Modalitas dalam kontestasi politik adalah modalitas selain peran figur, juga sangat ditentukan oleh peran dukungan politik dan ekonomi, aktor-aktor sosial politik dan ekonomi untuk kemenangan pemilukada. Berikut 4 (empat) modalitas yang harus dimiliki kandidat yang hendak mengikuti kontestasi pada Pemilukada langsung, sebagai berikut :

#### **2.2.2.1. Modal Sosial**

Latar belakang sosial yang dimiliki calon bisa dicermati seperti, tingkat pendidikan, pekerjaan awal, ketokohnya di dalam masyarakat (tokoh agama, adat, organisasi kepemudaan, profesi dan lain sebagainya) merupakan Modal sosial yang harus dimiliki kandidat berkaitan dengan membangun relasi dan kepercayaan dari masyarakat bahwa kekuasaan juga diperoleh karena kepercayaan.

Kepercayaan digunakan untuk memperoleh kedudukan merupakan seseorang atau sekelompok orang yang memang dapat dipercaya atas dasar kepercayaan masyarakat. Jika kekuasaan dilanggar, maka masyarakat dengan mudah tidak percaya lagi kepada pemegang kekuasaan. Pengaruh ketokohan dan popularitas, latar belakang pendidikan dan pekerjaan kandidat menentukan kemenangan pemilukada, karena untuk membangun relasi dan kepercayaan dari masyarakat kandidat harus memiliki pengaruh tersebut. Pandangan para pakar dalam mendefinisikan modal sosial di bagi dalam dua kelompok. Pertama menekankan pada jaringan hubungan sosial (*social network*), sedangkan kelompok kedua lebih menekankan pada karakteristik yang melekat (*embedded*) pada diri individu manusia yang terlibat dalam sebuah interaksi sosial.

Sejumlah ahli menyampaikan pandangan berbeda tentang modal sosial tetapi memiliki korelasi seperti diolah Mefi Hermawati yang dapat dicermati sebagai berikut :

- a. Robert Putnam (1993) : modal sosial adalah suatu *mutual trust* antara anggota masyarakat dan masyarakat terhadap pemimpinnya. Modal sosial didefinisikan sebagai institusi sosial yang melibatkan jaringan (*networks*), norma-norma (*norms*), dan kepercayaan sosial (*social trust*) yang mendorong kepada sebuah kolaborasi sosial (koordinasi dan kooperasi) untuk kepentingan bersama. Pendapat ini mengandung pengertian diperlukan ikatan/jaringan sosial yang ada dalam masyarakat, dan norma yang mendorong produktivitas. Putnam juga melonggarkan makna asosiasi horisontal, tidak hanya yang memberi *desireable outcome* (hasil pendapatan yang diharapkan) melainkan juga *undesirable outcome* (hasil tambahan).
- b. Pierre Bourdieu (1970), mendefinisikan modal sosial sebagai “sumber daya aktual dan potensial yang dimiliki seseorang berasal dari jaringan sosial yang terlembagakan serta berlangsung terus menerus dalam bentuk pengakuan dan perkenalan timbal balik (atau dengan kata lain : keanggotaan dalam kelompok sosial) yang memberikan kepada anggotanya berbagai bentuk dukungan kolektif”. Bourdieu juga menegaskan modal sosial sebagai sesuatu yang berhubungan satu dengan yang lain, baik ekonomi, budaya, maupun bentuk bentuk *social capital* (modal sosial) berupa insitusi lokal atau kekayaan sumber daya alam. Pendapatnya menegaskan

tentang modal sosial mengacu pada keuntungan dan kesempatan yang didapatkan seseorang di dalam masyarakat melalui keanggotaannya dalam entitas sosial tertentu (paguyuban, kelompok arisan, asosiasi tertentu).

- c. James Coleman (1999) mendefinisikan modal sosial sebagai suatu yang memiliki dua ciri, yaitu merupakan aspek dari struktur sosial serta memfasilitasi tindakan individu dalam struktur sosial tersebut. Dalam pengertian ini, bentuk-bentuk modal sosial berupa kewajiban dan harapan, potensi informasi, norma dan sanksi yang efektif, hubungan otoritas, serta organisasi sosial yang bisa digunakan secara tepat dan melahirkan kontrak sosial. Coleman membagi dua kubu, yaitu sosiologis dan ekonom yang masing-masing berbeda ketika melihat modal sosial sebagai entitas dalam ruang partisipasi publik.
- d. Dari sudut pandang lain, North (1990) dan Olson (1982) menekankan lingkungan sosial politik sebagai modal sosial. Faktor lingkungan berpengaruh pada peluang bagi norma untuk mengembangkan dan membentuk struktur sosial. Jika pandangan Putnam dan Coleman hanya menekankan pada asosiasi horisontal dan vertikal, North dan Olson menambahkan peran struktur dan hubungan institusional yang lebih formal, seperti pemerintah, rezim politik, hukum, sistem peradilan, serta kebebasan sipil dan politik.

Bahasan mengenai *trust* jadi unsur penting dalam kajian Francis Fukuyama yang terkait dengan kebajikan sosial dan modal sosial. Fukuyama mendefinisikan modal sosial (*social capital*) sebagai serangkaian nilai atau norma-norma informal yang dimiliki bersama diantara anggota suatu kelompok yang memungkinkan terjalannya kerjasama diantara mereka.

Fukuyama mengeksplorasi modal sosial guna mendeskripsikan bahwa masyarakat dengan kepercayaan tinggi, dijamin sukses menjalankan visi dan misinya (*high trust society*). Sebaliknya, sikap saling curiga, suka menaruh kecewa kepada unit masyarakat yang lain, selalu menabung cemburu satu sama lain, adalah indikasi rendahnya kepercayaan (*low trust society*) di masyarakat. Atau diistilahkan dengan ketiadaan kepercayaan (*zero trust society*). Analoginya adalah ketika seorang calon anggota legislatif terpilih tidak berdasarkan modal sosial berupa kepercayaan yang tinggi, akan kesulitan menjalankan misi politik sehari-harinya.

Modal sosial bagi Fukuyama adalah kapabilitas yang muncul dari kepercayaan umum di dalam sebuah masyarakat atau dibagian-bagian tertentu darinya. Ia bisa dilembagakan dalam kelompok sosial yang paling kecil dan paling mendasar, modal sosial berbeda dengan modal manusia (*human capital*) sejauh ia bisa diciptakan dan ditransmisikan melalui mekanisme kultural seperti agama, tradisi atau sejarah. Modal sosial yaitu dukungan figur kandidat karena ketokohan sehingga adanya kepercayaan dari masyarakat menciptakan interaksi sosial dan adanya jaringan-jaringan yang mendukung.

Fukuyama (1999) menyatakan bahwa modal sosial memegang peranan yang sangat penting dalam memfungsikan dan memperkuat kehidupan masyarakat modern. Modal sosial merupakan syarat yang harus dipenuhi bagi pembangunan

manusia, pembangunan ekonomi, sosial, politik dan stabilitas demokrasi. Modal sosial yang lemah akan meredupkan semangat gotong royong, memperparah kemiskinan, meningkatkan pengangguran, kriminalitas, dan menghalangi setiap upaya untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk.

Teori modal sosial merupakan teori yang paling tegas, dapat diringkas dalam dua kata: soal hubungan. Dengan membangun hubungan dengan sesama, dan menjaganya agar terus berlangsung sepanjang waktu, orang mampu bekerja bersama-sama untuk mencapai berbagai hal yang tidak dapat dilakukan sendiri, atau dapat dicapai tetapi dengan susah payah. Orang berhubungan melalui jaringan dan mereka cenderung memiliki kesamaan nilai dengan anggota lain dalam jaringan tersebut, sejauh jejaring menjadi sumber daya, dapat dipandang sebagai modal (Field,2010:1).

#### **2.2.2.2. Modal Budaya**

Modal budaya adalah satu konsep sosiologi yang telah mendapat popularitas yang meluas sejak ia mulai disuarakan oleh Pierre Bourdieu. Bourdieu dan Jean-Claude Passeron pertama kali menggunakan istilah dalam "*Cultural Reproduction dan Social Reproduction*" (1973).

modal budaya bertindak sebagai hubungan sosial dalam sistem pertukaran yang termasuk pengetahuan budaya terkumpul yang memberikan kuasa dan status. Bourdieu menyatakan modal budaya merujuk kepada aset bukan fiskal yang melibatkan ilmu pendidikan, sosial dan intelektual.

Modal budaya merupakan pengetahuan atau selera yang bernilai secara budaya dan pola-pola konsumsi. Modal budaya menjadi penentu kedudukan sosial

seseorang karena seperti yang kita tahu, cita rasa ditentukan secara sosial. Modal budaya sendiri merupakan dimensi yang lebih luas dari habitus.

Modal budaya diperoleh individu dengan cara yang terbentuk dan terinternalisasi padanya sejak ia kecil, terutama melalui ajaran orang tuanya dan pengaruh lingkungan keluarganya. Maka, dapat dikatakan bahwa modal budaya dibentuk oleh lingkungan sosial yang multidimensional serta pendidikan yang diperoleh oleh individu tersebut, baik pendidikan formal maupun warisan keluarga. Dan individu hanya dapat memahami tentang modal dan budaya secara tak sadar, karena dengan cara itulah hal tersebut baru akan berfungsi secara efektif. Modal budaya memiliki beberapa dimensi, antara lain:

- a. Pengetahuan obyektif tentang seni dan budaya
- b. Cita rasa budaya (cultural taste) dan preferensi
- c. Kualifikasi-kualifikasi formal (seperti gelar-gelar universitas)
- d. Kemampuan-kemampuan budayawi dan pengetahuan praktis.
- e. Kemampuan untuk dibedakan dan untuk membuat perbedaan antara yang baik dan buruk.

Modal budaya, memungkinkan kita untuk memperoleh kesempatan kesempatan dalam hidup, karena modal budaya menghasilkan kesetaraan maupun ketidaksetaraan yang akan selalu termotivasi manusia untuk memenuhi kebutuhannya untuk mencapai suatu kelas sosial tertentu. Modal sendiri dapat diperoleh jika individu memiliki habitus yang tepat dalam hidupnya.

Bagi kebudayaan Indonesia, pemikiran Bourdieu memberikan manfaat signifikan dalam upaya memahami dan menganalisis kesenjangan sosial-budaya,

ekonomi, dan politik yang ada di masyarakat, karena modal budaya dan habitus memberi pencerahan terhadap bentuk dan struktur budaya. Hal ini relevan dengan masyarakat Indonesia yang mengenal yang namanya kelas sosial, dimana individu yang memiliki status sosial tinggi lebih dihormati dan dikenal daripada individu yang memiliki status sosial rendah.

Menurut Haryatmoko (2003), para pelaku menempati posisi-posisi masing-masing yang ditentukan oleh dua dimensi: *pertama*, menurut besarnya modal yang dimiliki; dan *kedua*, sesuai dengan bobot komposisi keseluruhan modal mereka.

### **2.2.2.3. Modal Politik**

Kandidat dalam pemilukada memerlukan dukungan politik diusung dari partai politik (koalisi partai). Partai politik adalah organisasi politik yang mengajukan kandidat dalam pemilukada untuk mengisi jabatan politik di pemerintahan dan kemudian dipilih oleh rakyat. Sedangkan Pemilu adalah merupakan suatu cara atau sarana untuk menentukan orang-orang yang akan mewakili rakyat dalam menjalankan roda pemerintahan. Kandidat akan berusaha sebanyak mungkin menggalang koalisi partai politik yang mendapatkan kursi dan suara di DPRD hasil pemilu legislatif, namun dukungan parpol yang tidak memiliki kursi di DPRD juga tetap digalang.

Pemilukada sebagai arena kompetisi antar kandidat. Fungsi partai politik sebagai alat untuk memobilisasi dukungan relatif kecil sehingga kandidat yang ingin memenangkan pilkada harus sebanyak mungkin memanfaatkan jaringan organisasi-organisasi politik untuk memperoleh dukungan politik karena kompetisi lebih menonjol terhadap pengaruh figur kandidat. Pengertian modal politik dalam ilmu sosial memang masih terus dipertajam dan publikasi mengenai modal politik

ini jauh lebih sedikit dibanding publikasi mengenai modal simbolik (*symbolic capital*), modal sosial (*social capital*), modal budaya (*cultural capital*) maupun modal ekonomi (*economic capital*).

Sosiolog Prancis, Pierre Bourdieu (1930-2002), adalah sosok pelopor dalam mengkaji berbagai bentuk modal itu (*multiple forms of capital*). Namun Bourdieu sering dikritik karena cenderung deterministik dan kurang berpijak pada hal-hal empirik dalam membangun teorinya. Kecenderungan kurang berpijaknya Bourdieu pada kenyataan empirik yang kemungkinan membuatnya tidak sempat menajamkan uraiannya mengenai modal politik padahal dinamika akumulasi dan penggunaan modal politik memiliki lingkaran pengaruh sangat besar bagi kehidupan sehari-hari.

Casey sebagaimana dikutip Sudirman Nasir (2009), mendefinisikan modal politik sebagai pendayagunaan keseluruhan jenis modal yang dimiliki seorang pelaku politik atau sebuah lembaga politik untuk menghasilkan tindakan politik. Casey lebih lanjut memerinci adanya empat pasar politik yang berpengaruh pada besaran modal politik yang dimiliki oleh seorang pelaku politik atau sebuah lembaga politik.

Pasar politik pertama adalah pemilu karena pemilu adalah instrumen dasar untuk pemilihan pemimpin dalam sistem demokrasi, pasar politik kedua adalah perumusan dan pelaksanaan kebijakan-kebijakan publik. Pasar politik ketiga adalah dinamika hubungan dan konflik antara pelaku politik dan lembaga politik dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan-kebijakan publik. Pasar politik keempat adalah pendapat atau pandangan umum (*public opinion*) mengenai pelaku politik atau lembaga politik itu.

Modal simbolik atau dalam hubungannya dengan dinamika politik bisa dipahami sebagai besaran legitimasi, reputasi, dan tingkat penghormatan (*respect*) yang diperoleh oleh pelaku-pelaku politik ataupun lembaga-lembaga politik akibat tindakan-tindakan politik yang dilakukan atau tidak dilakukannya. A.Hick dan J.Misra (1993) mengatakan modal politik adalah berbagai fokus pemberian kekuasaan/sumber daya untuk merealisasikan hal-hal yang dapat mewujudkan kepentingan meraih kekuasaan. Intinya, modal politik adalah kekuasaan yang dimiliki seseorang, yang kemudian bisa dioperasikan atau berkontribusi terhadap keberhasilan kontestasinya dalam proses politik seperti pemilihan umum.

Dalam pandangan Foucault (1982), kekuasaan terutama berarti kapasitas untuk melakukan atau menjadi hal-hal tertentu secara paripurna. Kekuasaan dipraktikkan oleh individu atau sekelompok manusia ketika mereka saling berinteraksi. Penggunaan kekuasaan terdapat dalam penetapan aturan apa yang bisa dan tidak bisa dilakukan dalam mengatur hasil yang mungkin muncul. Dalam sistem otoriter, relasi kekuasaan secara progresif tergovernmentalisasi dalam arti semakin delaborasikan, dirasionalisasikan dan dipusatkan dalam bentuk atau dibawah naungan institusi-institusi negara.

Pemilu merupakan arena untuk melakukan mekanisme sirkulasi elit dalam mengisi jabatan-jabatan politik di pemerintahan. Elit di dalam politik harus memiliki keunggulan-keunggulan. Jika melihat prosentase kandidat yang diusung dan didukung oleh parpol (koalisi partai) baik dari hasil kursi atau hasil suara dari pemilu legislatif masing-masing pasangan kandidat berbeda bahkan ada pasangan kandidat tertentu mendapatkan dukungan suara parpol sangat besar atau lebih dominan. Namun meskipun kandidat yang diusung oleh suara partai lebih besar

belum tentu otomatis dapat memenangkan pilkada secara langsung, karena itu dalam pilkada pengaruh figur lebih besar dan kompetisi antar partai (koalisi parpol) tidak terlalu menonjol.

Peran figur kandidat dipandang sangat menentukan karena Pemilu/pilkada sebagai arena kontestasi tidak terdapat kontestasi yang kuat antar partai melainkan antar kandidat. Selain dukungan kandidat dari parpol, kandidat juga harus berusaha sebanyak mungkin memperoleh dukungan dari kekuatan-kekuatan non-politik seperti organisasi keagamaan, pemuda, profesi dan lainnya. Dalam konteks lokal (daerah) banyak terdapat elit-elit yang menduduki jabatan politik dan jabatan-jabatan strategis yang mempunyai peran penting dan pengaruh terhadap kelompok dan masyarakat di daerah tersebut. Menurut Nurhasim,dkk, Elit politik dalam konteks lokal yaitu :

*“Elit Politik Lokal adalah mereka yang memiliki jabatan politik tinggi di tingkat lokal yang membuat dan menjalankan kebijakan politik. Elit politiknya seperti Gubernur, Bupati, Walikota, Ketua DPRD, Anggota DPRD, maupun pemimpin-pemimpin partai yang ada di tingkat daerah. Elit Non-Politik Lokal adalah seseorang yang menduduki jabatan-jabatan strategis dan mempunyai pengaruh untuk memerintah orang lain dalam lingkup masyarakat. Elit non politik ini seperti elit keagamaan, elit organisasi masyarakat, kepemudaan, profesi dan lain sebagainya”.*

Kandidat memerlukan selain dukungan partai politik, juga dukungan elit-elit politik lokal dan elit politik tersebut memiliki peran yang menonjol dalam politik dan bidang lain serta memiliki pengaruh yang besar dengan keunggulan-keunggulan yang dimiliki calon kepala daerah, dan kandidat juga harus memiliki kapasitas pribadi yang berkualitas, seperti kedudukan di partai politik dengan melihat posisi strategis dalam struktur jabatan di partai politik dan pemerintahan. Modal politik yaitu dukungan politik berupa dukungan Partai Politik (koalisi partai)

dan dukungan elit-elit politik lokal dari organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan untuk kemenangan pilkada.

#### **2.2.2.4. Modal Ekonomi**

Saat pemilukada tentu setiap kandidat dalam mempersiapkan dan menghadapi kontestasi perlu modalitas ekonomi atau dana politik yang tidak sedikit, karena berkaitan dengan pembiayaan yang besar atau berdasarkan penggunaan dana politik itu sendiri. Pengertian modal ekonomi berangkat dari pemahaman terhadap benda yang memiliki nilai ekonomis yang disimbolkan dengan uang/mata uang.

Dalam perspektif ekonomi, modal bisa pula berupa investasi yang diberikan seseorang pada pihak lain, kemudian dipertukarkan dengan keuntungan berupa barang atau uang/jasa politik. Modal ekonomi memiliki makna penting sebagai “penggerak” dan “pelumas” mesin politik yang dipakai. Didalam musim kampanye misalnya membutuhkan uang yang besar untuk membiayai berbagai kebutuhan seperti mencetak poster, spanduk, membayar iklan, dan berbagai kebutuhan yang lainnya.

Bahkan modal ekonomi dapat menjadi prasyarat utama ketika calon itu bukan berasal dari partai yang dicalonkannya. Para ekonom telah lama berbicara mengenai modal (*capital*) ini, khususnya modal ekonomi atau finansial (*financial capital*). Modal *financial* adalah sejumlah uang yang dapat dipergunakan untuk membeli fasilitas dan alat-alat produksi perusahaan (misalnya pabrik, mesin, alat kantor, kendaraan) atau sejumlah uang yang dapat dikumpul atau ditabung untuk investasi di masa depan. Konsep modal seperti ini relatif mudah dipahami oleh orang awam sekalipun, karena membelanjakan atau menginvestasikan uang

merupakan bagian kehidupan sehari-hari manusia dan melibatkan pemikiran yang jelas. Modal *financial* juga mudah untuk diukur. Uang dapat dihitung, karena jumlah uang yang dibelanjakan dapat diidentifikasi dengan barang yang dibeli.

Ahli ekonomi John Stuart Mill dalam *Principle of Political Economy* (1848) seperti dikutip Augusto Bunga (2008), menggunakan istilah “*capital*” dengan arti : (1) barang fisik yang dipergunakan untuk menghasilkan barang lain, dan (2) suatu dana yang tersedia untuk mengupah buruh. Pada akhir abad ke-19, modalitas dalam artian barang fisik yang dipergunakan untuk menghasilkan barang lain, dipandang sebagai salah satu di antara empat faktor utama produksi (tiga lainnya adalah tanah, tenaga kerja dan organisasi atau manajemen).

Para ahli ekonomi neo-klasik menggunakan pandangan ini (misalnya Alfred Marshall dalam *Principles of Political Economies* 1890). Modal dalam konteks ekonomi seringkali dipadankan dengan pemikiran tentang kapitalisme dengan segala kontroversinya. Modal politik dan ekonomi saling berkaitan dalam iklim politik yang menekankan kepada interaksi spontan (jarak waktu komunikasi yang pendek) antara pemilih dan calon politik. Waktu yang pendek dalam sosialisasi diri selaku calon politisi mendorong penggunaan modal ekonomi sebagai jalur pintas. Kondisi ini banyak terjadi di negara-negara berkembang yang masih dalam proses transisi menuju Pemilu rasional dan penciptaan pemilih rasional.

Kandidat memerlukan dukungan ekonomi selain dari kandidat juga berasal dari aktor-aktor ekonomi untuk kemenangan pilkada dalam pembiayaan semua kegiatan politik kandidat. Menurut Sahdan dan Haboddin bahwa Proses politik pilkada membutuhkan biaya/ongkos yang sangat mahal. Hal ini menyebabkan tantangan bagi proses perkembangan demokrasi lokal, karena kandidat yang

bertarung adalah para pemilik uang/modal yang besar. Mahalnya ongkos pilkada dapat disebabkan oleh 3 (tiga) faktor, yaitu :

1. Pasangan calon kepala daerah yang akan bertarung diharuskan membeli partai politik sebagai kendaraan politik. Partai politik yang akan dijadikan kendaraan dalam pilkada mengharuskan pasangan calon untuk menyetor danaa sumbangan hingga miliaran rupiah.
2. Model kampanye politik yang dilakukan oleh pasangan calon membutuhkan banyak biaya. Misalnya, buat poster, pemasangan iklan di media massa baik cetak maupun elektronik.
3. Untuk membujuk pemilih biasanya menggunakan praktek politik uang. Model pemberian uang kepada pemilih biasanya dilakukan hampir pada setiap proses pentahapan pilkada. Peredaran uang yang paling menonjol pada saat kampanye pasangan kandidat dan menjelang pemungutan suara.

Sahdan dan Haboddin (2009), bahwa setiap penyelenggaraan pilkada membutuhkan “dana politik” untuk biaya kegiatan pilkada. Istilah dana politik dapat dibedakan dengan melihat sumber dan penggunaan, yaitu :

1. Dilihat dari sumbernya, dana politik berasal dari sumbangan pasangan calon dan sumbangan dari para simpatisan (donatur) baik secara perseorangan maupun perusahaan. Dana politik juga bisa diartikan sebagai wujud konkrit dari partisipasi dan dukungan masyarakat terhadap pasangan calon kepala daerah.
2. Dari sisi pengguna, dana politik dibedakan berdasarkan bentuk peruntukan pengeluarannya menjadi pengeluaran untuk membiayai

aktivitas rutin partai politik dan pengeluaran kampanye. Dalam konteks pilkada penggunaan dana politik dilakukan oleh calon pasangan tidak hanya untuk pengeluaran kampanye dalam bentuk mencetak brosur, konvoi, biaya transportasi, biaya konsumsi, cetak kaos, poster dan iklan. Tetapi juga mengenai pengeluaran pasangan calon untuk bayar partai politik yang akan dijadikan kendaraan politik, dan membeli suara masyarakat.

Berikut adalah alur bagaimana Dana politik (kampanye) dan siapa saja pihak yang terlibat di dalamnya :

**Gambar.2.1. Bagan Dana Kampanye**



Sumber: Diolah oleh Penulis dari Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015

Bagan di atas menunjukkan bahwa dana politik kandidat bersumber dari dana pribadi dan Penyumbang dari simpatisan (donatur) baik secara perseorangan maupun perusahaan dan dana politik berdasarkan penggunaannya dipergunakan

untuk bayar partai, kampanye dan beli suara. Pengeluaran biaya sangat besar dimungkinkan dalam sistem pilkada, mengingat arena kontestasi yang sangat terbuka dan kompetitif apalagi pemilih ditempatkan sebagai penentu apakah pasangan dipilih/tidak dipilih yang terpengaruh oleh besarnya dana politik kandidat.

Hal inilah yang membuat para kandidat dalam pilkada mengeluarkan dana politik yang sangat mahal, karena pelaksanaan pilkada sejak persiapan hingga kampanye, mobilisasi dan keperluan *cost politik* lainnya oleh para kandidat mempunyai pengaruh terhadap biaya yang diperlukan berdasarkan penggunaannya dan besarnya modalitas kandidat terkadang menjadi alasan parpol mengusung kandidat dan mengambil keuntungan dari kekuatan modalitas kandidat.

Modal Ekonomi yaitu dukungan ekonomi berupa dana politik baik itu berdasarkan sumbernya dari dana pribadi atau donatur, dan berdasarkan penggunaannya untuk kegiatan sosialisasi, akomodasi dan kampanye, hal ini menjadi salah satu modal yang sangat diperlukan untuk mendukung kemenangan kandidat dalam pilkada.

### **2.3 Kerangka pikir Teoritik**

Pemilukada merupakan arena kontestasi politik dengan kompetisi antar pasangan kandidat dan kemenangan ditentukan suara terbanyak oleh pemilih. Kompetisi yang terjadi dipengaruhi oleh kapasitas figur masing-masing pasangan calon kandidat. Arena kontestasi pilkada di Kabupaten Luwu Utara telah melahirkan bupati perempuan pertama di luwu utara sekaligus di sulawesi selatan yaitu Indah Putri Indriani. Kemenangan Indah Putri Indriani dalam pilkada ini

tidak semata-mata diperoleh melalui jalan pintas tapi untuk mencapai kemenangan ini memerlukan modalitas untuk bersaing dalam kontestasi tersebut.

Dalam pemilu, modal sosial memiliki makna yang sangat penting bahkan tidak kalah pentingnya dibandingkan dengan modal yang lain. Memiliki modal sosial yang tinggi, para kandidat tidak hanya dikenal oleh para pemilih. Lebih dari itu, secara dekat latar belakang sosial yang dimiliki calon bisa dicermati seperti, pekerjaan awal, ketokohnya di dalam masyarakat (tokoh agama, adat, organisasi kepemudaan, profesi dan lain sebagainya), serta hubungan relasi yang terbangun sesama masyarakat merupakan modal sosial yang harus dimiliki kandidat, para pemilih bisa melakukan penilaian apakah pasangan yang ada itu layak untuk dipilih atau tidak.

Modal budaya bisa dilihat dari latar belakang pendidikan dan juga latar belakang keturunan (keluarga), hal ini memiliki pengaruh terhadap konfigurasi pemilih didalam kontestasi politik. Dalam pemilu tidak jarang juga para pemilih menentukan pilihannya berdasarkan latar belakang para kandidat.

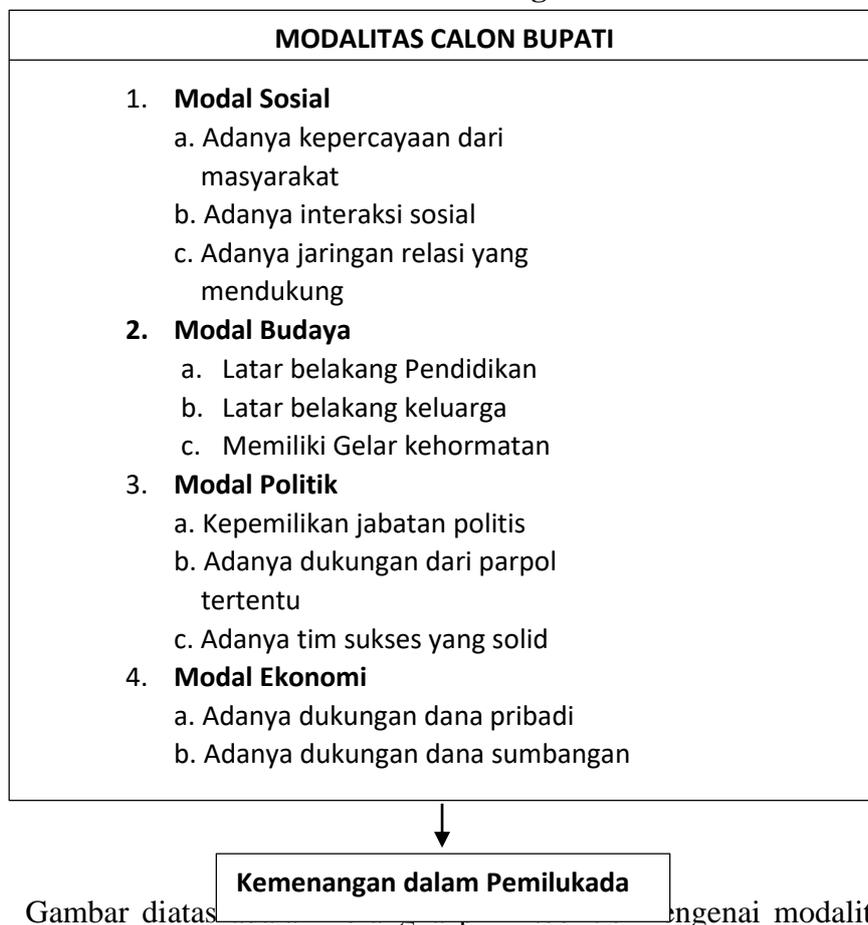
Modal sosial dan modal budaya, dalam kontestasi politik termasuk pemilu secara langsung jelas membutuhkan modal politik, apakah modal itu merupakan pengalaman berpolitik atukah pernah menduduki jabatan politis seperti partai politik atau anggota DPR, modal politik inilah yang dianggap mampu mendapatkan dukungan-dukungan politis mulai dari dukungan para tokoh politik ataupun dukungan-dukungan partai politik lainnya.

Modal ekonomi juga merupakan modalitas yang penting didalam kontestasi, modal ekonomi ini tidak hanya dipakai untuk membiayai pelaksanaan kampanye, tetapi modal untuk memobilisasi dukungan pada saat menjelang dan

berlangsungnya tahapan kampanye. Modal ekonomi ini bisa didapatkan melalui dana pribadi ataupun dana sumbangan baik itu sumbangan secara individu ataupun kelompok.

Modalitas inilah yang mempengaruhi suatu kemenangan dalam kontestasi, dalam hal ini adalah modalitas Indah Putri Indriani dalam pemilukada Luwu Utara 2015, sehingga berdasarkan uraian kerangka pemikiran diatas, maka dapat dijelaskan dalam gambar sebagai berikut.

**Gambar 2.2. Kerangka Pikir**



perempuan pertama di sulawesi selatan dalam kontestasi politik lokal sesuai yang dibahas dalam proposal tesis ini. Kerangka pikir teoritis ini diharapkan sebagai acuan dalam pembahasan tesis dengan maksud untuk pengayaan teori-teori

sehingga menghasilkan temuan-temuan baru yang relevan dengan penelitian ini. Adapun penjelasan dari kerangka pikir teoritis adalah sebagai berikut :

Untuk menganalisis modalitas Indah Putri Indriani dalam pemilukada Luwu Utara 2015, penulis menggunakan teori *multiple forms of capital* menurut Pierre Bourdieu (1930-2002). Menurut Pierre Bourdieu ada beberapa variabel modalitas yaitu, modal sosial (*social capital*), modal budaya (*cultural capital*), modal politik (*political capital*) maupun modal ekonomi (*economic capital*).

#### **2.4. Definisi Konseptual**

Definisi konseptual dalam penelitian ini, sebagai berikut :

1. Modalitas dalam Kontestasi Politik adalah modalitas selain peran figur, juga sangat ditentukan oleh peran dukungan politik dan ekonomi, elit-elit/aktor-aktor sosial politik dan ekonomi untuk kemenangan pemilukada.
2. Modal sosial yaitu dukungan figur kandidat karena ketokohan sehingga adanya kepercayaan dari masyarakat menciptakan interaksi sosial dan adanya jaringan-jaringan relasi yang mendukung.
3. Modal budaya yaitu dukungan budaya berupa latar belakang pendidikan dan juga latar belakang keluarga, serta memiliki gelar prestise seperti gelar kebangsawanan dan juga gelar haji/haja.
4. Modal politik yaitu dukungan politik berupa kepemilikan jabatan-jabatan politis serta dukungan Partai Politik (koalisi partai) dan adanya tim sukses yang solid.
5. Modal Ekonomi yaitu dukungan ekonomi berupa dana politik baik itu berdasarkan sumbernya dari dana pribadi dan donatur, dan berdasarkan

penggunaannya untuk bayar partai politik, kampanye untuk pemenangan pemilukada.

## **2.5. Definisi Operasional**

Adapun operasionalisasi dalam penelitian ini, sebagai berikut:

### **1. Modal Sosial**

- a. Adanya kepercayaan dari masyarakat
- b. Adanya interaksi sosial
- c. Adanya jaringan relasi yang mendukung

### **2. Modal Budaya**

- a. Latar belakang pendidikan yang jelas
- b. Latar belakang keturunan (keluarga)
- c. Adanya gelar prestise (kebangsawanan dan haji/haja)

### **3. Modal Politik**

- a. Kepemilikan jabatan politis
- b. Adanya dukungan dari parpol tertentu
- c. Adanya tim sukses yang solid

### **3. Modal Ekonomi**

- a. Adanya dukungan dana Pribadi
- b. Adanya dukungan dana dari donatur